

Organisasi Profesi Guru

5.0

Kritik Konseptual, Distorsi Praktik,
Rekonstruksi Rasional,
Menuju Profesionalisme dan
Keterbukaan Publik



Dr. Andi Hermawan, SE.Ak, S.Si, M.Pd.



Dr. Andi Hermawan, SE.Ak, S.Si, M.Pd.

Organisasi Profesi Guru

5.0

Kritik Konseptual, Distorsi Praktik,
Rekonstruksi Rasional,
Menuju Profesionalisme dan
Keterbukaan Publik



INSIGHT
PUSTAKA

ORGANISASI PROFESI GURU 5.0

Kritik Konseptual, Distorsi Praktik, Rekonstruksi Rasional,
Menuju Profesionalisme dan Keterbukaan Publik

Penulis:

Dr. Andi Hermawan, SE.Ak, S.Si, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative
Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-47-9

xviii + 404 hlm; 15,5x23 cm.

©Maret 2026



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul ***Organisasi Profesi Guru 5.0: Kritik Konseptual, Distorsi Praktik, dan Rekonstruksi Rasional Menuju Profesionalisme dan Keterbukaan Publik*** ini dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca.

Buku ini lahir bukan dari kegelisahan sesaat, apalagi dari semangat menyalahkan. Ia tumbuh dari perenungan panjang, dialog batin, serta pengalaman akademik dan praksis yang memperlihatkan satu kenyataan penting: bahwa profesi guru sebagai pilar peradaban bangsa tidak mungkin berdiri kokoh tanpa organisasi profesi yang sehat, bermartabat, dan dipercaya publik.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, organisasi profesi guru memiliki peran strategis—bukan hanya sebagai wadah administratif, tetapi sebagai penjaga nilai, etika, keilmuan, dan martabat profesi. Namun, seiring perubahan zaman, kompleksitas kebijakan, serta derasnya arus birokratisasi dan politisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi profesi guru menghadapi tantangan serius. Di sinilah muncul jarak antara idealitas dan realitas, antara tujuan luhur dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Buku ini mencoba memotret kondisi tersebut secara jujur dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan bukan kritik personal, bukan pula serangan institusional, melainkan kritik konseptual yang berpijak pada

filsafat profesi, teori organisasi, etika publik, dan prinsip tata kelola modern. Dengan pendekatan tersebut, kritik tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan, tetapi justru untuk memperbaiki, menata ulang, dan menguatkan.

Istilah **Organisasi Profesi Guru 5.0** digunakan sebagai simbol perubahan paradigma. Ia menandai pergeseran dari organisasi yang bersifat simbolik menuju organisasi yang substantif; dari struktur yang tertutup menuju tata kelola yang transparan; dari budaya administratif menuju budaya keilmuan; serta dari orientasi internal menuju tanggung jawab publik. Organisasi profesi guru tidak lagi cukup hanya hadir, tetapi harus bermakna—bagi anggotanya, bagi pendidikan, dan bagi masyarakat luas.

Melalui lima belas bab yang disusun secara sistematis—mulai dari hakikat profesi guru, landasan filosofis, dinamika historis, distorsi praktik, hingga roadmap nasional dan visi masa depan—buku ini berupaya menghadirkan jalan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun moral. Jalan yang tidak utopis, tetapi juga tidak kompromistis terhadap nilai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak mungkin sempurna. Namun besar harapan agar karya ini dapat menjadi ruang dialog intelektual, bahan refleksi kolektif, serta kontribusi nyata bagi pembaruan organisasi profesi guru di Indonesia. Buku ini ditujukan tidak hanya bagi pengurus organisasi profesi, tetapi juga bagi guru, akademisi, mahasiswa pendidikan, pengambil kebijakan, dan seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan pendidikan bangsa.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat, membuka cakrawala berpikir, serta menumbuhkan keberanian intelektual untuk menata kembali organisasi profesi guru sebagai rumah keilmuan, ruang etika, dan nurani kolektif bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap ikhtiar baik demi pendidikan Indonesia yang bermartabat.



Prolog

Mengapa Organisasi Profesi Guru Harus Dipikirkan Ulang

Profesi guru menempati posisi strategis dalam bangunan peradaban modern. Di tangan guru, nilai, pengetahuan, dan arah masa depan generasi bangsa dibentuk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi profesi guru tidak dapat dipahami semata sebagai wadah administratif, melainkan sebagai institusi yang memikul tanggung jawab moral, intelektual, dan sosial yang luas.

Secara konseptual, organisasi profesi hadir untuk menjaga standar keilmuan, melindungi martabat profesi, serta memastikan bahwa praktik profesional berjalan sesuai dengan nilai etik dan kepentingan publik. Dalam kerangka tersebut, organisasi profesi guru seharusnya menjadi ruang kolektif bagi pengembangan intelektualitas, refleksi etik, dan penguatan posisi guru sebagai aktor utama pendidikan.

Namun, dinamika pendidikan kontemporer menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas tersebut dengan realitas yang berlangsung. Perubahan kebijakan yang cepat, kompleksitas birokrasi pendidikan, serta tuntutan administratif yang terus meningkat telah menggeser makna profesionalisme guru dari substansi ke prosedur. Dalam situasi ini, organisasi

profesi sering kali terjebak pada fungsi representatif yang bersifat simbolik, sementara fungsi keilmuan dan etik justru melemah.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana organisasi profesi guru masih berfungsi sebagai penjaga nilai profesi, dan sejauh mana ia telah bertransformasi menjadi bagian dari mekanisme struktural yang kurang memberi ruang bagi suara dan aspirasi guru secara substantif. Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan peran organisasi, melainkan untuk menguji kembali relevansi, arah, dan tanggung jawabnya di tengah perubahan zaman.

Pemikiran ulang terhadap organisasi profesi guru menjadi semakin penting ketika pendidikan memasuki era masyarakat terbuka dan digital. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik bukan lagi pilihan normatif, melainkan prasyarat legitimasi kelembagaan. Organisasi profesi yang tertutup, minim refleksi, dan kurang adaptif berisiko kehilangan kepercayaan tidak hanya dari anggotanya, tetapi juga dari masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut, profesionalisme guru tidak dapat dilepaskan dari kualitas organisasi profesinya. Profesionalisme bukan semata persoalan kompetensi individu, melainkan juga hasil dari sistem kolektif yang membentuk, mengarahkan, dan melindungi praktik profesional. Organisasi profesi yang lemah secara konseptual akan melahirkan profesionalisme yang rapuh secara praksis.

Prolog ini tidak dimaksudkan sebagai kritik emosional, melainkan sebagai ajakan reflektif berbasis nalar ilmiah. Ia berangkat dari kesadaran bahwa organisasi profesi, sebagaimana institusi sosial lainnya, bukan entitas yang beku, melainkan konstruksi historis yang perlu terus ditinjau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Dengan kerangka berpikir tersebut, buku ini mengusulkan perlunya rekonstruksi rasional terhadap organisasi profesi guru. Rekonstruksi yang tidak berhenti pada perubahan struktural, tetapi menyentuh dimensi filosofis, teoretis, dan etik. Tujuannya bukan menggantikan organisasi yang ada,

melainkan memperkuat fondasi keberadaannya agar mampu menjalankan fungsi profesional secara lebih bermakna.

Konsep **Organisasi Profesi Guru 5.0** dalam buku ini diposisikan sebagai paradigma analitis, bukan slogan normatif. Ia merepresentasikan upaya mengintegrasikan profesionalisme, humanisme, tata kelola modern, dan keterbukaan publik dalam satu kerangka yang koheren. Paradigma ini menempatkan guru sebagai subjek intelektual, organisasi sebagai institusi moral, dan publik sebagai pihak yang berhak memperoleh akuntabilitas.

Dengan demikian, berpikir ulang tentang organisasi profesi guru bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan wujud tanggung jawab akademik. Ia merupakan bagian dari ikhtiar menjaga martabat profesi guru agar tetap relevan, berdaya, dan bermakna dalam perjalanan panjang pendidikan bangsa.

Prolog ini menjadi pintu masuk bagi pembahasan yang lebih sistematis pada bab-bab selanjutnya, yang akan mengkaji organisasi profesi guru dari aspek filosofis, historis, sosiologis, hingga desain transformasi ke depan. Harapannya, pembaca diajak tidak hanya untuk memahami persoalan, tetapi juga untuk menimbang secara rasional jalan pembaruan yang mungkin ditempuh.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prolog	v
Daftar Isi	ix

Bab 1

HAKIKAT PROFESI GURU

DALAM PERADABAN MODERN	1
Profesi sebagai konstruksi sosial dan moral	5
Guru sebagai pekerja intelektual	9
Guru sebagai agen perubahan sosial	12
Guru dan tanggung jawab peradaban	16
Etika profesi dalam pendidikan	19
Profesi guru dalam masyarakat demokratis	22
Martabat profesi dan legitimasi publik	25
Guru sebagai subjek, bukan objek kebijakan	28
Profesionalisme sebagai panggilan nurani	31
Relevansi profesi guru di abad ke-21	34

Bab 2

ORGANISASI PROFESI GURU:

KONSEP DAN IDEALITAS	37
Pengertian organisasi profesi.....	40
Tujuan utama organisasi profesi guru	43
Fungsi perlindungan profesi.....	46
Fungsi pengembangan keilmuan	48
Fungsi advokasi dan kebijakan.....	51
Fungsi pembinaan etika profesi	53
Organisasi sebagai rumah kolektif guru	56
Organisasi profesi dan kepercayaan publik.....	58
Organisasi sebagai institusi moral	61
Idealitas organisasi profesi guru	63

Bab 3

LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORETIS ORGANISASI

PROFESI.....	67
Ontologi profesi dan organisasi	70
Epistemologi keilmuan profesi guru	72
Aksiologi dan nilai profesi.....	75
Teori profesi modern.....	78
Teori organisasi sosial	81
Teori kelembagaan publik.....	83
Teori legitimasi dan otoritas	86
Teori partisipasi profesional	88
Teori akuntabilitas dan transparansi	90
Sintesis filosofis organisasi profesi guru.....	93

Bab 4

SEJARAH DAN DINAMIKA

ORGANISASI PROFESI GURU	97
Organisasi guru pada masa kolonial	99
Peran organisasi guru dalam kemerdekaan.....	102
Organisasi guru pada era orde lama.....	104
Organisasi guru pada era orde baru	107
Organisasi guru pasca reformasi	109
Relasi organisasi dan negara.....	111
Perubahan orientasi organisasi	113
Dampak kebijakan pendidikan nasional	115
Dinamika pusat dan daerah	118
Pelajaran historis bagi masa depan.....	120

Bab 5

ORGANISASI PROFESI GURU

DALAM PRAKTIK KEKINIAN	123
Struktur organisasi aktual.....	125
Mekanisme keanggotaan.....	128
Pola kepemimpinan organisasi	130
Sistem pengambilan keputusan.....	133
Program kerja organisasi	135
Pola komunikasi internal	137
Hubungan dengan pemerintah.....	140
Hubungan dengan masyarakat	142
Persepsi anggota terhadap organisasi.....	144
Potret empiris organisasi profesi hari ini.....	147

Bab 6

DISTORSI PRAKTIK ORGANISASI

PROFESI GURU	151
Distorsi tujuan organisasi	153
Distorsi fungsi profesional.....	155
Distorsi advokasi guru	158
Distorsi kaderisasi kepemimpinan	160
Distorsi partisipasi anggota	162
Distorsi transparansi keuangan.....	164
Distorsi relasi politik	166
Distorsi komunikasi publik	168
Distorsi nilai dan etika	171
Dampak distorsi terhadap profesi guru	173

Bab 7

KRISIS PROFESIONALISME DAN

REPRESENTASI GURU	177
Makna krisis profesionalisme.....	179
Profesionalisme administratif	182
Sertifikasi tanpa transformasi.....	184
Guru sebagai objek organisasi.....	186
Kesenjangan pusat dan daerah.....	188
Lemahnya suara akar rumput	190
Keletihan psikologis guru	192
Menurunnya kepercayaan organisasi.....	194
Representasi simbolik guru	196
Implikasi krisis bagi mutu pendidikan	198

Bab 8

ORGANISASI PROFESI DALAM ERA

DISRUPSI DAN SOCIETY 5.0	201
Perubahan lanskap profesi global	203
Society 5.0 dan dunia kerja.....	205
Tantangan digitalisasi organisasi	207
Transformasi komunikasi profesi	209
Media sosial dan opini publik	211
Risiko disinformasi organisasi	213
Etika digital organisasi profesi	215
Data dan transparansi publik	216
Organisasi profesi di ruang terbuka	218
Urgensi transformasi menuju 5.0	220

Bab 9

KONSEP ORGANISASI

PROFESI GURU 5.0	223
Pengertian Organisasi Profesi Guru 5.0.....	225
Filosofi dasar Guru 5.0.....	227
Nilai inti organisasi 5.0.....	229
Prinsip human-centered organization	231
Organisasi berbasis keilmuan.....	233
Organisasi berbasis pelayanan	235
Organisasi berbasis data.....	236
Organisasi adaptif dan kolaboratif	238
Organisasi transparan dan akuntabel.....	240
Keunggulan paradigma 5.0.....	241

Bab 10

TATA KELOLA ORGANISASI

PROFESI GURU 5.0	245
Konsep good professional governance.....	247
Struktur organisasi ideal	249
Sistem check and balance	251
Kepemimpinan etis dan kolektif.....	253
Mekanisme pengambilan keputusan terbuka	255
Manajemen keuangan transparan	256
Audit kinerja organisasi	258
Audit moral profesi.....	260
Sistem pengawasan partisipatif.....	262
Akuntabilitas kepada publik.....	263

Bab 11

KETERBUKAAN PUBLIK DAN

AKUNTABILITAS SOSIAL	267
Makna keterbukaan publik.....	269
Hak publik atas informasi profesi.....	272
Organisasi profesi dan demokrasi	274
Transparansi program dan anggaran	275
Pelaporan kinerja organisasi	277
Partisipasi publik profesional	279
Kepercayaan sebagai modal sosial.....	280
Penguatan legitimasi publik	282
Risiko dan tantangan keterbukaan	284
Keterbukaan sebagai etika organisasi.....	285

Bab 12

TRANSFORMASI ORGANISASI

PROFESI GURU	289
Mengapa transformasi tidak terhindarkan.....	291
Diagnosis kelembagaan organisasi	293
Manajemen perubahan organisasi.....	295
Resistensi dan konflik internal.....	297
Penguatan kapasitas kepengurusan.....	298
Reformasi regulasi internal.....	300
Digitalisasi sistem organisasi.....	302
Budaya baru organisasi profesi	303
Indikator keberhasilan transformasi.....	305
Evaluasi berkelanjutan organisasi.....	307

Bab 13

ROADMAP NASIONAL ORGANISASI

PROFESI GURU	309
Visi jangka panjang profesi guru	311
Tahap jangka pendek (1–3 tahun)	313
Tahap jangka menengah (4–10 tahun)	315
Tahap jangka panjang (hingga 2045)	317
Sinkronisasi kebijakan nasional	319
Sinergi negara dan profesi	320
Peran perguruan tinggi	322
Peran masyarakat sipil.....	323
Penguatan jejaring nasional.....	325
Indikator keberhasilan nasional.....	327

Bab 14

ORGANISASI PROFESI GURU SEBAGAI INSTITUSI MORAL PUBLIK	329
Organisasi profesi dan etika publik	331
Tanggung jawab sosial organisasi	334
Organisasi sebagai penjaga nilai	336
Moral kolektif profesi guru	338
Keteladanan institusional	340
Keberanian moral organisasi	342
Organisasi dalam krisis bangsa	344
Guru sebagai suara akal sehat	346
Organisasi dan nurani publik	348
Warisan etis bagi generasi mendatang	350

Bab 15

MASA DEPAN PROFESI GURU DAN ORGANISASI 5.0	353
Guru Indonesia menuju 2045	355
Organisasi profesi masa depan	356
Profesi guru dalam masyarakat terbuka	358
Tantangan global profesi pendidikan	360
Intelektualitas kolektif guru	362
Organisasi sebagai pusat pengetahuan	363
Regenerasi kepemimpinan profesi	365
Keberlanjutan organisasi profesi	366
Harapan bagi guru Indonesia	368
Penutup reflektif masa depan profesi	369

Epilog 371

Executive Summary 375

Glosarium..... 379

Daftar Pustaka..... 391

Biografi Penulis..... 401



Bab 1

HAKIKAT PROFESI GURU DALAM PERADABAN MODERN

Profesi guru merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembentukan dan keberlanjutan peradaban manusia. Sejak awal sejarah masyarakat modern, guru tidak hanya diposisikan sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai agen yang mentransmisikan nilai, membentuk kesadaran, serta menanamkan orientasi moral generasi. Dalam konteks ini, profesi guru tidak dapat dipahami secara sempit sebagai aktivitas teknis mengajar, melainkan sebagai peran strategis yang berada di jantung kehidupan sosial. Setiap masyarakat yang maju selalu menempatkan guru pada posisi penting karena melalui pendidikanlah arah peradaban ditentukan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai profesi guru menuntut pendekatan yang tidak sekadar administratif atau fungsional, tetapi konseptual dan filosofis. Bab ini berupaya membangun pemahaman dasar mengenai hakikat profesi guru sebagai fondasi berpikir bagi pembahasan organisasi profesi pada bab-bab selanjutnya. Tanpa pemahaman yang kokoh mengenai makna profesi guru, setiap diskursus tentang profesionalisme, organisasi,

maupun kebijakan pendidikan berisiko kehilangan kedalaman dan arah substansialnya.

Dalam perspektif ilmu sosial, profesi merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui kesepakatan nilai, norma, dan legitimasi publik. Profesi tidak hadir secara alamiah, melainkan dibangun melalui proses sejarah, pengakuan sosial, serta pembentukan standar keilmuan dan etik. Guru sebagai profesi berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, profesi guru tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkelindan dengan struktur sosial, kebijakan negara, dan dinamika budaya masyarakat. Pemahaman ini penting untuk menegaskan bahwa martabat profesi guru sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan institusi memperlakukannya. Ketika profesi direduksi menjadi sekadar pekerjaan rutin, maka makna sosial dan moralnya akan tereduksi pula. Oleh karena itu, melihat profesi guru sebagai konstruksi sosial berarti menyadari bahwa keberadaannya menuntut pemeliharaan nilai, perlindungan sistemik, dan penguatan legitimasi publik secara terus-menerus.

Selain sebagai konstruksi sosial, profesi guru juga merupakan konstruksi moral. Setiap tindakan profesional guru memiliki implikasi etik karena berhubungan langsung dengan pembentukan manusia. Tidak ada keputusan pedagogis yang sepenuhnya netral secara moral, sebab setiap proses pembelajaran selalu membawa nilai tertentu. Dalam konteks ini, guru tidak hanya bertanggung jawab atas pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga atas pembentukan karakter, cara berpikir, dan orientasi kehidupan mereka. Dimensi moral inilah yang membedakan profesi guru dari banyak profesi lain. Ketika guru mengajar, sesungguhnya ia sedang turut menentukan kualitas masa depan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme guru tidak dapat diukur semata melalui kompetensi teknis, melainkan juga melalui integritas, tanggung jawab etik, dan kepekaan sosial. Pemahaman terhadap dimensi moral profesi guru menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu sistem pendidikan benar-benar berpihak pada kemanusiaan.



Bab 2

ORGANISASI PROFESI GURU: KONSEP DAN IDEALITAS

Pembahasan mengenai profesi guru tidak dapat berhenti pada dimensi individual semata. Profesi, dalam pengertian sosiologis dan kelembagaan, selalu memerlukan wadah kolektif yang menjamin keberlanjutan nilai, identitas, dan kepentingannya. Di sinilah organisasi profesi menemukan relevansinya. Organisasi profesi tidak lahir sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai konsekuensi logis dari lahirnya profesi itu sendiri. Ketika suatu pekerjaan menuntut keahlian khusus, tanggung jawab publik, serta komitmen moral, maka diperlukan institusi yang mampu menjaga standar, melindungi martabat, dan memperkuat posisi sosial para anggotanya. Bab ini berangkat dari kesadaran bahwa profesi guru, sebagaimana telah dibahas pada Bab 1, tidak dapat bertahan hanya melalui idealisme personal. Ia membutuhkan sistem kolektif yang menopang, mengarahkan, dan menjaga keberlanjutan profesionalisme dalam jangka panjang.

Dalam sejarah profesi modern, organisasi profesi hadir sebagai mekanisme institusional untuk menegaskan identitas dan otonomi profesi.

Organisasi memungkinkan profesi berbicara dengan satu suara, membangun standar bersama, serta membedakan dirinya dari pekerjaan nonprofesional. Tanpa organisasi, profesi mudah terfragmentasi dan kehilangan kekuatan sosial. Dalam konteks pendidikan, organisasi profesi guru seharusnya menjadi ruang konsolidasi nilai, bukan sekadar struktur formal. Ia menjadi tempat di mana guru membangun kesadaran kolektif tentang makna profesinya, arah perjuangannya, dan tanggung jawab publik yang diembannya. Oleh karena itu, memahami organisasi profesi guru memerlukan pendekatan yang lebih dalam daripada sekadar melihat struktur kepengurusan atau legalitas formalnya.

Organisasi profesi juga merupakan bentuk institusionalisasi nilai. Nilai-nilai profesional seperti integritas, tanggung jawab, dan komitmen keilmuan tidak akan bertahan lama apabila hanya bergantung pada kesadaran individu. Organisasi berfungsi menjaga nilai tersebut agar hidup secara kolektif dan berkelanjutan. Dalam pengertian ini, organisasi profesi bukan sekadar alat, melainkan penjaga etos profesi. Ketika organisasi kehilangan fungsi nilai ini, maka profesi berisiko mengalami degradasi makna. Guru tetap ada secara jumlah, tetapi profesinya melemah secara substansi. Oleh sebab itu, bab ini menempatkan organisasi profesi sebagai entitas normatif sekaligus struktural yang menentukan kualitas profesi guru secara keseluruhan.

Dalam praktik pendidikan modern, organisasi profesi guru memikul beragam fungsi yang kompleks. Ia diharapkan mampu melindungi profesi dari tekanan eksternal, mengembangkan keilmuan guru, melakukan advokasi kebijakan, sekaligus membina etika profesi. Kompleksitas ini menuntut organisasi yang matang secara konseptual dan kuat secara moral. Tanpa kerangka konseptual yang jelas, organisasi cenderung bergerak reaktif, pragmatis, dan kehilangan arah strategis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dan idealitas organisasi profesi menjadi penting agar fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara parsial dan sporadis.

Bab ini tidak dimaksudkan untuk menilai praktik organisasi profesi secara langsung, melainkan membangun kerangka ideal sebagai tolak



Bab 3

LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORETIS ORGANISASI PROFESI

Pembahasan mengenai organisasi profesi guru tidak akan mencapai kedalaman analitis yang memadai apabila hanya bertumpu pada deskripsi struktural dan normatif. Organisasi profesi bukan sekadar entitas praktis, melainkan konstruksi pemikiran yang berdiri di atas asumsi-asumsi filosofis tertentu. Setiap konsep tentang profesi, organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab publik selalu berakar pada cara manusia memahami realitas, pengetahuan, dan nilai. Oleh karena itu, Bab 3 hadir sebagai fondasi reflektif yang menempatkan organisasi profesi guru dalam kerangka filsafat ilmu dan teori sosial yang sistematis.

Tanpa landasan filosofis, diskursus organisasi profesi mudah terjebak pada perdebatan pragmatis dan reaktif. Kebijakan diperdebatkan tanpa pijakan ontologis, fungsi dijalankan tanpa kesadaran epistemologis, dan nilai ditegakkan tanpa refleksi aksiologis. Akibatnya, organisasi bergerak tetapi tidak memahami arah gerakannya. Bab ini bertolak dari kesadaran bahwa krisis organisasi profesi pada banyak konteks bukan semata

persoalan manajemen, melainkan krisis cara berpikir tentang profesi itu sendiri.

Filsafat ilmu menyediakan kerangka dasar untuk menjawab tiga pertanyaan fundamental: apa hakikat profesi dan organisasi, bagaimana pengetahuan profesional dibangun, dan untuk apa profesi dijalankan. Ketiga pertanyaan tersebut—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—menjadi poros utama Bab 3. Melalui poros ini, organisasi profesi guru dipahami bukan hanya sebagai sistem kerja, tetapi sebagai ekspresi pandangan manusia tentang pendidikan, pengetahuan, dan tanggung jawab sosial.

Ontologi profesi mempersoalkan hakikat keberadaan guru dan organisasi profesinya. Apakah profesi guru sekadar pekerjaan fungsional, ataukah entitas sosial bermakna? Apakah organisasi hanya alat administratif, atau institusi nilai? Pertanyaan ontologis ini menentukan bagaimana organisasi dibentuk, dijalankan, dan dinilai. Kesalahan ontologis sering kali melahirkan organisasi yang besar secara struktur, tetapi miskin makna.

Epistemologi keilmuan profesi guru menyentuh persoalan sumber, validitas, dan pengembangan pengetahuan profesional. Pendidikan bukan sekadar penerapan teori, melainkan praktik reflektif yang melahirkan pengetahuan khas profesi. Organisasi profesi memiliki peran penting dalam mengelola epistemologi ini: menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah, bagaimana pengalaman guru diolah menjadi ilmu, serta bagaimana keilmuan profesi diwariskan dan dikembangkan.

Aksiologi profesi menempatkan organisasi dalam ranah nilai dan tujuan. Profesi guru tidak bebas nilai; ia selalu diarahkan pada pembentukan manusia dan peradaban. Oleh karena itu, organisasi profesi tidak dapat bersikap netral secara moral. Bab ini menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi—baik kebijakan internal maupun sikap publik—selalu membawa implikasi nilai. Tanpa kesadaran aksiologis, organisasi berisiko kehilangan orientasi etiknya.

Selain filsafat ilmu, Bab 3 juga berpijak pada teori profesi modern yang menjelaskan bagaimana profesi terbentuk, dipertahankan, dan mengalami transformasi. Teori-teori ini membantu memahami relasi antara profesi,



Bab 4

SEJARAH DAN DINAMIKA ORGANISASI PROFESI GURU

Sejarah merupakan ruang tempat gagasan diuji oleh waktu. Jika pada bab sebelumnya organisasi profesi guru dipahami melalui lensa filsafat dan teori, maka pada bab ini organisasi tersebut ditempatkan dalam perjalanan historis yang konkret. Sejarah tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi memperlihatkan bagaimana nilai, kekuasaan, dan kepentingan saling berinteraksi dalam praktik kelembagaan. Oleh karena itu, pembacaan sejarah organisasi profesi guru bukan sekadar kronologi peristiwa, melainkan analisis dinamika sosial yang membentuk wajah organisasi hingga hari ini.

Organisasi profesi guru tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam konteks kolonialisme, perjuangan kebangsaan, perubahan rezim politik, dan transformasi sistem pendidikan nasional. Setiap fase sejarah meninggalkan jejak institusional yang memengaruhi orientasi, budaya, dan relasi kekuasaan organisasi. Dengan memahami sejarah tersebut, pembaca dapat melihat bahwa banyak persoalan organisasi hari ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa kolonial, organisasi guru muncul sebagai ruang kesadaran kolektif dan perlawanan intelektual. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen kesadaran kebangsaan. Organisasi menjadi medium artikulasi identitas, harga diri, dan aspirasi kemerdekaan. Dimensi moral dan politik pendidikan melebur dalam satu tarikan sejarah.

Memasuki masa kemerdekaan, organisasi guru menghadapi tantangan baru: transisi dari gerakan perjuangan menuju institusi dalam negara yang baru berdiri. Idealitas profesi diuji oleh kebutuhan stabilitas nasional dan konsolidasi kekuasaan. Di sinilah mulai tampak ketegangan antara independensi profesi dan kepentingan negara.

Era orde lama dan orde baru memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Organisasi profesi guru tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan pendidikan, tetapi juga dengan ideologi dan kontrol politik. Dalam situasi tersebut, ruang otonomi profesi mengalami penyempitan. Banyak organisasi bertahan secara struktural, tetapi kehilangan sebagian fungsi kritisnya.

Perubahan besar terjadi pada era reformasi. Kebebasan berserikat membuka kembali ruang demokrasi profesi. Namun, kebebasan tersebut juga membawa fragmentasi, kompetisi organisasi, dan tantangan baru dalam menjaga legitimasi dan arah perjuangan profesi. Reformasi menghadirkan peluang sekaligus kebingungan kelembagaan.

Bab ini juga menyoroti relasi organisasi profesi guru dengan negara sebagai relasi yang terus berubah. Dari relasi konfrontatif, kooptatif, hingga kolaboratif, hubungan ini membentuk karakter organisasi secara signifikan. Negara, sebagai pemegang otoritas kebijakan pendidikan, selalu menjadi aktor dominan yang memengaruhi ruang gerak profesi.

Selain faktor negara, kebijakan pendidikan nasional juga memberi dampak besar terhadap orientasi organisasi. Perubahan kurikulum, sertifikasi, manajemen guru, dan sistem penilaian kinerja membentuk ulang agenda organisasi profesi. Dalam banyak kasus, organisasi harus menyesuaikan diri dengan kebijakan, terkadang dengan mengorbankan idealitas awal.



Bab 5

ORGANISASI PROFESI GURU DALAM PRAKTIK KEKINIAN

Setelah menelusuri perjalanan panjang organisasi profesi guru melalui lintasan sejarah, bab ini mengajak pembaca memasuki ruang kekinian, yakni realitas organisasi sebagaimana dijalani dan dirasakan oleh guru hari ini. Jika bab sebelumnya berbicara tentang masa lalu sebagai pembentuk, maka bab ini berbicara tentang masa kini sebagai konsekuensi. Organisasi profesi guru tidak lagi berada dalam ruang idealitas, melainkan beroperasi di tengah tuntutan nyata, tekanan kebijakan, dan ekspektasi publik yang semakin kompleks.

Praktik kekinian organisasi profesi guru tidak dapat dipahami hanya melalui dokumen resmi atau struktur formal. Ia harus dibaca dari cara organisasi bekerja sehari-hari: bagaimana kepemimpinan dijalankan, bagaimana keputusan diambil, bagaimana komunikasi berlangsung, dan bagaimana anggota memaknai keberadaan organisasi. Di sinilah sering muncul jarak antara apa yang tertulis dan apa yang dialami.

Dalam konteks pendidikan modern, organisasi profesi guru menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, organisasi dituntut adaptif terhadap perubahan kebijakan, digitalisasi, dan tuntutan akuntabilitas publik. Di sisi lain, organisasi diharapkan tetap menjadi penjaga profesionalisme, etika, dan martabat guru. Ketegangan antara adaptasi dan idealitas inilah yang membentuk wajah organisasi hari ini.

Bab ini menempatkan organisasi profesi guru sebagai entitas hidup yang tidak steril dari kompromi, rutinitas, dan keterbatasan. Banyak organisasi tampil aktif secara administratif, namun belum tentu kuat secara substantif. Aktivitas yang padat tidak selalu berbanding lurus dengan keberdayaan profesional. Fenomena ini menjadi titik kritis yang perlu dibaca secara jujur.

Struktur organisasi yang rapi sering kali belum menjamin partisipasi yang bermakna. Mekanisme keanggotaan yang luas tidak otomatis melahirkan rasa memiliki. Kepemimpinan yang sah secara struktural belum tentu legitim secara moral. Bab ini berangkat dari kesadaran bahwa profesionalisme tidak hidup dalam bagan organisasi, melainkan dalam praktik relasional sehari-hari.

Dalam praktik kekinian, organisasi profesi guru juga berada dalam tekanan citra dan ekspektasi publik. Masyarakat menuntut guru profesional, adaptif, dan berintegritas. Namun ketika organisasi profesi tidak tampil kuat dalam membela mutu dan etika, kepercayaan publik perlahan melemah. Bab ini mengajak pembaca melihat hubungan timbal balik antara praktik internal organisasi dan persepsi eksternal masyarakat.

Perubahan teknologi dan ruang digital turut membentuk wajah organisasi masa kini. Komunikasi menjadi cepat, tetapi tidak selalu bermakna. Informasi melimpah, tetapi diskursus profesional sering dangkal. Organisasi dituntut hadir di ruang publik digital, namun belum semua memiliki kapasitas pengelolaan yang matang.

Hubungan organisasi dengan pemerintah pada masa kini juga semakin kompleks. Negara membuka ruang dialog, tetapi tetap memegang kendali kebijakan. Organisasi berada dalam posisi antara: diharapkan kritis, namun



Bab 6

DISTORSI PRAKTIK ORGANISASI PROFESI GURU

Bab ini menandai pergeseran penting dalam alur pemikiran buku, dari pemotretan realitas menuju analisis kritis atas penyimpangan praktik organisasi profesi guru. Jika bab sebelumnya menggambarkan bagaimana organisasi bekerja dalam kenyataan sehari-hari, maka bab ini berusaha menjelaskan mengapa praktik tersebut menyimpang dari mandat filosofis, historis, dan profesional yang seharusnya diemban. Distorsi tidak dipahami sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai gejala sistemik yang tumbuh secara perlahan dalam tubuh organisasi.

Dalam kajian organisasi modern, distorsi merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara tujuan, struktur, dan nilai. Organisasi yang awalnya dibangun untuk melayani profesi dapat berubah orientasi ketika tekanan kebijakan, kepentingan politik, dan tuntutan administratif semakin dominan. Distorsi muncul bukan karena niat buruk semata, melainkan karena adaptasi yang berlebihan terhadap lingkungan eksternal.

Bab ini menempatkan distorsi sebagai fenomena rasional yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ketika tujuan luhur organisasi tidak lagi diterjemahkan dalam praktik nyata, maka terjadi pergeseran makna. Organisasi tetap hidup secara struktural, tetapi kehilangan ruh profesional. Inilah bentuk distorsi paling halus sekaligus paling berbahaya.

Distorsi juga tidak selalu tampak dalam bentuk pelanggaran terbuka. Ia sering hadir sebagai normalisasi praktik yang keliru. Ketika kebiasaan administratif menggantikan refleksi profesional, ketika kompromi menjadi kebajikan, dan ketika keberanian moral dianggap risiko, maka distorsi telah bekerja secara diam-diam.

Dalam konteks organisasi profesi guru, distorsi berkembang di berbagai lapisan. Ia muncul dalam tujuan organisasi yang menyempit, fungsi profesional yang melemah, advokasi yang tumpul, serta kaderisasi kepemimpinan yang stagnan. Distorsi tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain membentuk lingkaran kelembagaan yang sulit diputus.

Bab ini tidak dimaksudkan sebagai penghakiman moral terhadap organisasi atau individu tertentu. Pendekatan yang digunakan bersifat diagnostik, bukan represif. Distorsi diperlakukan sebagai penyakit organisasi yang harus dikenali sebelum dapat disembuhkan. Kritik diarahkan pada sistem, bukan pada personal.

Penting untuk dipahami bahwa distorsi sering kali diterima sebagai kewajaran. Praktik yang semula bersifat sementara berubah menjadi permanen. Apa yang awalnya kompromi berubah menjadi norma. Di titik inilah organisasi kehilangan kemampuan reflektifnya.

Bab ini juga menegaskan bahwa distorsi tidak akan pernah teratasi hanya dengan pergantian kepemimpinan. Selama pola berpikir dan sistem kerja tidak berubah, distorsi akan terus berulang dalam bentuk baru. Oleh karena itu, pembacaan distorsi harus bersifat struktural dan filosofis.

Dengan mengurai berbagai bentuk distorsi secara sistematis, bab ini bertujuan membangun kesadaran kritis kolektif. Kesadaran menjadi



Bab 7

KRISIS PROFESIONALISME DAN REPRESENTASI GURU

Bab ini menandai fase penting dalam alur pemikiran buku, yakni peralihan dari analisis distorsi organisasi menuju pembacaan dampaknya terhadap makna profesionalisme guru itu sendiri. Jika bab sebelumnya membedah kerusakan sistemik pada tubuh organisasi profesi, maka bab ini mengkaji bagaimana kerusakan tersebut menjalar ke dalam identitas, psikologi, dan posisi sosial guru sebagai profesi publik.

Profesionalisme guru tidak hanya merupakan seperangkat kompetensi teknis, tetapi sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh penguatan, kepercayaan, dan representasi institusional. Ketika organisasi profesi gagal menjalankan fungsi moral dan representatifnya, profesionalisme tidak runtuh secara struktural, tetapi terkikis secara maknawi. Guru tetap bekerja, tetapi makna bekerja sebagai profesi perlahan menghilang.

Krisis profesionalisme dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai kemunduran individu guru. Ia merupakan krisis sistemik yang lahir dari ketidakseimbangan antara tuntutan administratif, ekspektasi publik, dan

lemahnya dukungan institusional. Profesionalisme dipaksa hadir dalam kerangka kepatuhan, bukan dalam kerangka otonomi dan tanggung jawab moral.

Bab ini berangkat dari asumsi bahwa profesionalisme sejati tidak tumbuh melalui regulasi semata. Ia membutuhkan ruang refleksi, kepercayaan publik, dan representasi kolektif yang bermartabat. Ketika organisasi profesi tidak lagi menjadi jembatan antara guru dan ruang publik, maka profesionalisme kehilangan wadah sosialnya.

Salah satu gejala paling nyata dari krisis ini adalah menguatnya profesionalisme administratif. Guru dinilai melalui dokumen, indikator, dan prosedur, sementara kualitas reflektif, kebijaksanaan pedagogis, dan integritas moral semakin tersisih. Profesionalisme berubah menjadi kepatuhan teknis, bukan tanggung jawab intelektual.

Dalam kondisi demikian, sertifikasi dan berbagai instrumen pengakuan formal kehilangan daya transformasinya. Sertifikasi hadir sebagai mekanisme legitimasi administratif, bukan sebagai proses pembentukan profesional sejati. Guru diakui secara formal, tetapi tidak diperkuat secara substantif.

Bab ini juga mengungkap bagaimana guru perlahan direduksi menjadi objek organisasi. Alih-alih menjadi subjek kolektif yang berpikir dan menentukan arah profesi, guru diposisikan sebagai penerima kebijakan, peserta program, dan pelaksana keputusan. Representasi profesional menjadi satu arah dan kehilangan dialog.

Krisis semakin dalam ketika kesenjangan pusat dan daerah memperlemah rasa keadilan profesi. Guru di daerah sering kali mengalami realitas kebijakan yang berbeda dari narasi nasional. Ketika organisasi profesi gagal menjembatani kesenjangan ini, rasa keterwakilan semakin terkikis.

Lemahnya suara akar rumput menjadi ciri lain dari krisis representasi. Aspirasi guru tidak menemukan saluran yang efektif. Kritik mengendap di ruang informal, sementara ruang resmi tetap sunyi. Demokrasi profesi berubah menjadi formalitas struktural.



Bab 8

ORGANISASI PROFESI DALAM ERA DISRUPSI DAN SOCIETY 5.0

Bab ini menandai perubahan penting dalam alur besar buku, yakni pergeseran dari fase diagnosis krisis menuju pembacaan konteks zaman yang melingkupi organisasi profesi guru hari ini. Setelah bab-bab sebelumnya menguraikan distorsi, kelelahan, dan krisis representasi, bab ini mengajak pembaca keluar dari ruang problem menuju ruang tantangan masa depan.

Dunia profesi tidak lagi berada dalam kondisi stabil. Perubahan teknologi, dinamika sosial global, serta transformasi cara manusia bekerja telah mengubah makna profesi itu sendiri. Organisasi profesi guru tidak lagi berhadapan dengan persoalan internal semata, tetapi dengan perubahan peradaban yang bergerak cepat dan tidak linier.

Era disrupsi menghadirkan perubahan bukan secara bertahap, melainkan melalui lompatan. Cara belajar, bekerja, berkomunikasi, dan membangun kepercayaan publik mengalami redefinisi mendasar. Dalam konteks ini, organisasi profesi tidak dapat lagi bertahan dengan pola kerja lama yang hierarkis, tertutup, dan lamban.

Bab ini berpijak pada kesadaran bahwa krisis organisasi profesi guru bukan hanya disebabkan oleh kesalahan internal, tetapi juga oleh ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. Banyak praktik organisasi yang sesungguhnya relevan di masa lalu, namun kehilangan daya guna dalam lanskap digital dan masyarakat terbuka hari ini.

Society 5.0 memperkenalkan paradigma baru tentang relasi manusia dan teknologi. Teknologi tidak lagi sekadar alat efisiensi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem sosial. Dalam masyarakat seperti ini, organisasi profesi dituntut tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi reflektif secara nilai.

Perubahan dunia kerja juga memengaruhi ekspektasi terhadap profesi guru. Guru tidak lagi dipandang semata sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi sebagai pembelajar sepanjang hayat, produsen pengetahuan, dan figur publik di ruang digital. Organisasi profesi harus mampu membaca perubahan ini secara strategis.

Bab ini juga menyoroti transformasi ruang publik. Komunikasi tidak lagi dimonopoli institusi. Media sosial membuka ruang dialog, kritik, bahkan konflik secara terbuka. Dalam ruang seperti ini, diam bukan lagi netral, dan keterlambatan merespons dapat menurunkan wibawa organisasi. Digitalisasi organisasi membawa peluang sekaligus risiko. Transparansi meningkat, tetapi disinformasi juga menguat. Reputasi institusi dapat dibangun dalam hitungan tahun, namun dapat runtuh dalam hitungan menit. Organisasi profesi guru harus belajar hidup dalam ruang publik yang cair dan tanpa batas.

Bab ini memandang bahwa tantangan digital bukan persoalan teknologi semata, melainkan persoalan budaya organisasi. Transformasi tidak cukup dilakukan dengan membuat akun media sosial atau sistem digital, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir, cara memimpin, dan cara berkomunikasi. Dalam Society 5.0, data menjadi basis pengambilan keputusan publik. Organisasi profesi dituntut terbuka, akuntabel, dan berbasis informasi yang dapat diverifikasi. Kepercayaan publik tidak lagi dibangun melalui simbol, melainkan melalui keterbukaan proses.



Bab 9

KONSEP ORGANISASI PROFESI GURU 5.0

Bab ini merupakan titik kulminasi konseptual dari seluruh pembahasan sebelumnya. Setelah melalui pemetaan krisis, distorsi praktik, disrupsi zaman, serta tuntutan keterbukaan publik, buku ini kini memasuki fase rekonstruksi paradigmatis. Bab 9 tidak lagi berbicara tentang apa yang salah, melainkan tentang apa yang harus dibangun secara rasional dan berkelanjutan.

Organisasi Profesi Guru 5.0 diperkenalkan sebagai jawaban konseptual atas perubahan peradaban pendidikan. Paradigma ini lahir bukan dari optimisme naif terhadap teknologi, tetapi dari refleksi mendalam terhadap kegagalan model organisasi lama dalam menjaga martabat, makna, dan daya hidup profesi guru. Konsep 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem organisasi. Dalam paradigma ini, guru tidak dipahami sebagai objek kebijakan, anggota administratif, atau sumber legitimasi simbolik, melainkan sebagai subjek profesional yang berpikir, bernilai,

dan bermoral. Organisasi hadir untuk melayani dan memperkuat kapasitas manusia, bukan sebaliknya.

Bab ini berangkat dari kesadaran bahwa profesionalisme tidak dapat tumbuh dalam struktur yang menekan. Profesi hanya berkembang dalam organisasi yang memerdekakan. Oleh karena itu, Organisasi Profesi Guru 5.0 tidak dibangun atas logika kontrol, tetapi atas logika kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Transformasi menuju 5.0 juga berarti pergeseran orientasi organisasi dari administratif menuju substantif. Organisasi tidak lagi dinilai dari banyaknya program, melainkan dari kualitas dampaknya terhadap pengembangan keilmuan, etika, dan kesejahteraan profesional guru.

Bab ini menegaskan bahwa organisasi profesi tidak cukup hanya adaptif terhadap perubahan teknologi. Ia harus reflektif terhadap nilai. Teknologi hanya alat; arah moral tetap ditentukan oleh manusia. Tanpa fondasi filosofis yang kuat, digitalisasi justru berpotensi mempercepat distorsi. Konsep Guru 5.0 dalam bab ini dipahami sebagai figur profesional yang utuh—berpengetahuan, beretika, reflektif, dan kolaboratif. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi sebagai pemikir pendidikan dan penjaga nilai peradaban. Organisasi profesi harus mampu menopang peran luhur ini secara sistemik.

Bab ini juga menempatkan keilmuan sebagai jantung organisasi profesi. Tanpa basis pengetahuan yang hidup, organisasi akan berubah menjadi lembaga administratif kosong. Organisasi Profesi Guru 5.0 harus menjadi pusat produksi, diseminasi, dan dialog keilmuan profesi. Pelayanan profesional menjadi orientasi berikutnya. Organisasi hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani guru. Prinsip ini membalik logika lama yang sering menempatkan anggota sebagai pelengkap struktur. Dalam paradigma 5.0, pelayanan menjadi ukuran legitimasi.

Bab ini juga menegaskan pentingnya organisasi berbasis data. Keputusan tidak boleh lagi bertumpu pada intuisi elit atau kepentingan sempit. Data digunakan bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memandu kebijakan secara adil, transparan, dan objektif. Adaptivitas dan kolaborasi



Bab 10

TATA KELOLA ORGANISASI PROFESI GURU 5.0

Organisasi profesi guru tidak cukup dibangun di atas nilai, filosofi, dan visi moral semata. Nilai yang luhur hanya akan bermakna apabila diterjemahkan ke dalam tata kelola yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tata kelola organisasi profesi guru menjadi tahap krusial dalam perjalanan konseptual buku ini. Bab ini hadir sebagai jembatan antara gagasan ideal Organisasi Profesi Guru 5.0 dan praktik kelembagaan yang benar-benar dapat dijalankan secara rasional.

Dalam banyak kasus, kegagalan organisasi profesi bukan disebabkan oleh ketiadaan visi, melainkan oleh lemahnya sistem tata kelola. Organisasi dapat memiliki slogan yang progresif, tetapi tetap melahirkan praktik yang tertutup, elitis, dan tidak akuntabel. Ketimpangan antara nilai dan praktik inilah yang menyebabkan krisis kepercayaan internal maupun publik. Oleh sebab itu, tata kelola tidak boleh dipahami sebagai aspek teknis belaka, melainkan sebagai ekspresi moral dari organisasi itu sendiri.

Tata kelola organisasi profesi guru 5.0 berpijak pada prinsip bahwa kekuasaan kelembagaan harus selalu dibatasi, diawasi, dan diarahkan untuk melayani profesi. Kekuasaan yang tidak diatur secara sistemik berpotensi melahirkan dominasi personal, stagnasi kepemimpinan, serta pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan anggota. Bab ini menempatkan tata kelola sebagai mekanisme pengaman agar organisasi tidak menyimpang dari mandat profesinya.

Dalam paradigma 5.0, tata kelola tidak lagi berorientasi pada kepatuhan administratif semata, tetapi pada kualitas proses pengambilan keputusan. Organisasi tidak dinilai dari seberapa lengkap strukturnya, melainkan dari seberapa adil, terbuka, dan rasional setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, tata kelola dipahami sebagai proses deliberatif yang melibatkan nilai, data, dan partisipasi.

Bab ini juga menegaskan bahwa profesionalisme organisasi harus setara dengan profesionalisme individu guru. Jika guru dituntut akuntabel, reflektif, dan etis, maka organisasi profesinya harus menunjukkan standar yang sama. Tidak ada justifikasi moral bagi organisasi yang menuntut integritas anggotanya, tetapi gagal menampilkan integritas kelembagaan.

Tata kelola Organisasi Profesi Guru 5.0 menempatkan struktur bukan sebagai pusat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen pelayanan. Struktur organisasi harus dirancang untuk mempermudah koordinasi, mempercepat respons, dan memperluas partisipasi, bukan untuk mempertebal jarak antara pengurus dan anggota. Dalam kerangka ini, struktur ideal bukan yang paling besar, tetapi yang paling fungsional.

Bab ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem check and balance dalam organisasi profesi. Kekuasaan yang terkonsentrasi tanpa pengawasan akan melemahkan demokrasi profesi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal dan partisipatif menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang sehat. Organisasi yang dewasa adalah organisasi yang berani diawasi.

Aspek kepemimpinan mendapat perhatian khusus dalam bab ini. Kepemimpinan dalam Organisasi Profesi Guru 5.0 tidak lagi bertumpu pada



Bab 11

KETERBUKAAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS SOSIAL

Dalam teori demokrasi modern, keterbukaan publik dipahami sebagai fondasi utama legitimasi institusi sosial. **Jürgen Habermas (1996)** menjelaskan bahwa kekuasaan dan otoritas hanya memperoleh keabsahan ketika bersedia diuji dalam ruang publik melalui rasionalitas komunikatif. Organisasi yang menutup diri dari publik pada hakikatnya sedang memutus relasi legitimasi sosialnya. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi negara, tetapi juga bagi organisasi profesi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam kajian tata kelola publik, **Mark Bovens (2007)** menegaskan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi sosial yang melampaui hubungan internal organisasi. Institusi tidak cukup mempertanggungjawabkan diri kepada anggotanya, tetapi juga kepada publik yang terkena konsekuensi kebijakan dan tindakannya. Organisasi profesi guru berada tepat di wilayah ini karena pendidikan merupakan urusan publik yang menyentuh masa depan bangsa.

Konsep *open government* yang dikembangkan oleh **Osborne (2010)** memperluas makna keterbukaan sebagai transformasi relasi antara institusi dan masyarakat. Keterbukaan tidak lagi dimaknai sebatas publikasi informasi, melainkan sebagai perubahan cara berpikir: dari mengatur masyarakat menjadi berdialog dengan masyarakat. Prinsip ini menuntut pergeseran budaya kelembagaan yang mendalam.

Dalam perspektif sosiologi kepercayaan, **Niklas Luhmann (1979)** menjelaskan bahwa kepercayaan publik tumbuh ketika institusi mampu mengurangi ketidakpastian sosial. Transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengurang risiko tersebut. Ketertutupan, sebaliknya, menciptakan ruang spekulasi yang melemahkan wibawa institusi, bahkan ketika tidak terjadi penyimpangan nyata.

Laporan **OECD (2021)** menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang memiliki mekanisme keterbukaan dan pelaporan publik cenderung memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi. Data ini menegaskan bahwa keterbukaan publik bukan tuntutan normatif semata, melainkan kebutuhan struktural dalam masyarakat demokratis yang semakin sadar informasi.

Dalam konteks organisasi profesi guru, keterbukaan publik menandai perubahan mendasar posisi organisasi dalam tatanan sosial. Organisasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai rumah internal profesi, tetapi juga sebagai aktor publik yang suaranya memengaruhi arah pendidikan nasional. Oleh karena itu, relasi organisasi dengan masyarakat menjadi semakin penting dan tidak dapat dihindari.

Keterbukaan publik menuntut organisasi profesi untuk meninggalkan budaya eksklusivitas. Guru tidak lagi diposisikan sebagai kelompok tertutup yang hanya berbicara untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai komunitas profesional yang siap berdialog dengan masyarakat luas mengenai mutu, nilai, dan arah pendidikan.

Akuntabilitas sosial memperluas makna tanggung jawab organisasi. Keputusan internal tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Setiap kebijakan profesi



Bab 12

TRANSFORMASI ORGANISASI PROFESI GURU

Dalam teori perubahan organisasi, transformasi dipahami sebagai proses mendasar yang menyentuh struktur, budaya, dan cara berpikir institusi. **Kurt Lewin (1951)** menjelaskan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara kosmetik, melainkan melalui tahapan *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*. Transformasi bukan perbaikan kecil, tetapi pergeseran paradigma yang mengubah identitas organisasi itu sendiri. Dalam kajian organisasi modern, **Peter Drucker (1999)** menegaskan bahwa institusi yang tidak mampu berubah akan kehilangan relevansinya, meskipun pernah berjaya. Perubahan bukan ancaman bagi organisasi, melainkan syarat keberlanjutan di tengah dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan publik yang terus bergerak.

Perspektif *organizational learning* yang dikembangkan **Chris Argyris (1991)** menekankan bahwa transformasi sejati hanya mungkin terjadi ketika organisasi bersedia merefleksikan asumsi dasarnya. Tanpa refleksi mendalam, perubahan hanya bersifat prosedural dan mudah kembali ke

pola lama. Dalam teori kelembagaan, **W. Richard Scott (2014)** menjelaskan bahwa organisasi sering terjebak dalam *institutional inertia*, yaitu kecenderungan mempertahankan kebiasaan lama demi stabilitas semu. Transformasi menjadi sulit bukan karena tidak tahu apa yang salah, tetapi karena takut kehilangan kenyamanan struktural.

Laporan **OECD (2021)** menunjukkan bahwa organisasi profesi yang gagal bertransformasi cenderung kehilangan legitimasi publik meskipun tetap eksis secara formal. Data ini menegaskan bahwa eksistensi tanpa transformasi hanyalah keberlanjutan administratif tanpa makna sosial. Dalam konteks organisasi profesi guru, transformasi bukan pilihan suka-rela, melainkan keniscayaan sejarah. Perubahan masyarakat, teknologi, pola kerja guru, serta tuntutan publik telah menggeser posisi profesi guru secara fundamental. Organisasi yang tetap menggunakan cara lama tidak lagi mampu menjawab realitas baru.

Transformasi organisasi profesi tidak boleh dipahami sebagai pergantian kepengurusan semata. Ia menyentuh cara organisasi memahami profesi, melayani anggota, berkomunikasi dengan publik, dan mengambil keputusan strategis. Tanpa perubahan cara berpikir, perubahan struktur hanya bersifat simbolik. Bab ini menempatkan transformasi sebagai proses kelembagaan yang sadar. Organisasi tidak berubah karena tekanan sesaat, tetapi karena kesadaran bahwa nilai, tujuan, dan praktik lama tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman.

Transformasi juga mengandung risiko. Perubahan memunculkan resistensi, konflik, dan ketidakpastian internal. Namun organisasi yang matang tidak menghindari konflik, melainkan mengelolanya secara rasional dan bermartabat. Dalam paradigma 5.0, transformasi harus berorientasi pada manusia, nilai, dan keilmuan. Digitalisasi, regulasi baru, dan sistem modern hanya bermakna jika memperkuat martabat profesi, bukan memperluas kontrol struktural.

Bab ini mengajak organisasi profesi guru untuk berani melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri. Tidak ada transformasi tanpa keberanian melihat kelemahan internal secara jujur. Kritik diarahkan ke sistem,



Bab 13

ROADMAP NASIONAL ORGANISASI PROFESI GURU

Perjalanan organisasi profesi guru tidak dapat dilepaskan dari arah besar pembangunan bangsa. Profesi guru bukan entitas privat yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem nasional pendidikan yang memikul mandat konstitusional. Oleh karena itu, transformasi organisasi profesi tidak cukup dibangun melalui perubahan internal semata, tetapi memerlukan arah jangka panjang yang jelas, terencana, dan berpijak pada visi kebangsaan. Tanpa roadmap nasional, organisasi profesi berisiko berjalan reaktif, terfragmentasi, dan kehilangan kontribusi strategisnya bagi masa depan Indonesia.

Roadmap nasional berfungsi sebagai peta arah kolektif yang menghubungkan tujuan profesi dengan cita-cita negara. Ia menegaskan ke mana organisasi profesi guru hendak bergerak, nilai apa yang dijaga, serta peran apa yang ingin dimainkan dalam membentuk generasi bangsa. Dalam konteks ini, roadmap bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan

instrumen kesadaran historis yang menempatkan profesi guru sebagai aktor utama pembangunan manusia Indonesia.

Tanpa visi jangka panjang, organisasi profesi mudah terjebak pada kepentingan jangka pendek. Program kerja disusun tahunan tanpa kesinambungan, kepengurusan berganti tanpa arah bersama, dan kebijakan internal sering kehilangan konsistensi. Roadmap nasional hadir untuk memutus siklus tersebut dengan menghadirkan kesinambungan lintas periode, lintas kepemimpinan, dan lintas generasi guru.

Bab ini disusun dengan kesadaran bahwa Indonesia sedang memasuki fase penentuan sejarah menuju 2045. Bonus demografi, percepatan teknologi, dan tuntutan kualitas sumber daya manusia menempatkan guru sebagai faktor penentu. Organisasi profesi tidak boleh menjadi penonton dalam proses ini, tetapi harus tampil sebagai institusi strategis yang mampu menyelaraskan kepentingan profesi dengan agenda pembangunan nasional.

Roadmap nasional juga menjadi jembatan antara dunia profesi dan kebijakan negara. Selama ini, relasi antara organisasi profesi guru dan negara sering bersifat administratif atau reaktif. Melalui roadmap yang terstruktur, hubungan tersebut diarahkan menuju kemitraan strategis berbasis kepercayaan, kejelasan peran, dan pembagian tanggung jawab yang sehat.

Dalam bab ini, arah pembangunan profesi guru dibagi ke dalam tahapan waktu yang realistis: jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan tahapan konsisten yang memungkinkan pembelajaran, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan. Roadmap nasional bukan janji besar tanpa pijakan, melainkan strategi bertahap yang dapat diuji dan diperbaiki.

Bab ini juga menempatkan organisasi profesi guru dalam ekosistem nasional yang lebih luas. Perguruan tinggi, masyarakat sipil, negara, dan jejaring profesi diposisikan sebagai mitra strategis, bukan aktor yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, pembangunan profesi guru dipahami sebagai kerja kolaboratif lintas sektor, bukan beban tunggal organisasi.



Bab 14

ORGANISASI PROFESI GURU SEBAGAI INSTITUSI MORAL PUBLIK

Dalam perjalanan panjang organisasi profesi guru, terdapat satu tahap kedewasaan yang melampaui fungsi administratif, kepentingan kelembagaan, bahkan kepentingan profesi itu sendiri. Tahap tersebut adalah ketika organisasi menjelma menjadi institusi moral publik. Pada titik ini, organisasi tidak lagi sekadar mengatur anggota, melainkan memikul tanggung jawab etis terhadap masyarakat luas. Profesi guru, yang sejak awal lahir dari mandat sosial, pada akhirnya dipanggil untuk menjaga nilai-nilai yang menopang kehidupan bersama. Bab ini hadir untuk menempatkan organisasi profesi guru pada posisi tertingginya: sebagai penjaga nurani publik bangsa.

Institusi moral publik bukanlah lembaga yang mengklaim kesucian atau superioritas nilai. Ia justru hadir dalam kesadaran bahwa kekuasaan, kebijakan, dan sistem sering kali berjalan lebih cepat daripada kebijaksanaan. Dalam situasi seperti itulah masyarakat membutuhkan institusi yang mampu berbicara dengan suara akal sehat. Organisasi profesi guru memiliki

legitimasi moral unik karena kedekatannya dengan proses pembentukan manusia. Guru menyentuh masa depan bangsa bukan melalui pidato politik, tetapi melalui proses pendidikan yang sunyi namun menentukan.

Bab ini menegaskan bahwa profesi guru tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika publik. Pendidikan selalu memuat nilai, pilihan moral, dan konsekuensi sosial. Oleh karena itu, organisasi profesi guru tidak boleh bersikap netral terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang menyentuh kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Netralitas dalam situasi tidak adil sering kali berubah menjadi bentuk pembiaran. Di sinilah peran moral organisasi diuji.

Sebagai institusi moral publik, organisasi profesi guru tidak berdiri untuk menentang negara, tetapi juga tidak tunduk membisu pada kekuasaan. Ia berada pada posisi antara: menjaga keseimbangan antara loyalitas kebangsaan dan keberanian etis. Kesetiaan sejati kepada bangsa tidak selalu berarti diam, melainkan keberanian menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab. Bab ini mengajak pembaca memahami bahwa keberanian moral bukanlah sikap radikal, melainkan wujud tertinggi profesionalisme.

Dalam sejarah bangsa mana pun, institusi moral selalu menjadi jangkar ketika masyarakat mengalami krisis nilai. Ketika hukum kehilangan arah, ketika kebijakan terjebak kepentingan jangka pendek, dan ketika ruang publik dipenuhi kebisingan, suara yang jernih menjadi sangat langka. Organisasi profesi guru, jika matang secara etis, dapat menjadi salah satu sumber kejernihan tersebut. Bukan dengan retorika, tetapi dengan konsistensi nilai dan keteladanan institusional.

Bab ini juga menempatkan moralitas bukan sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai kesadaran kolektif profesi. Moral kolektif lahir ketika nilai hidup dalam kebiasaan organisasi, bukan hanya dalam kode etik tertulis. Ketika organisasi mampu menjaga integritasnya secara konsisten, ia membentuk karakter profesi yang melampaui generasi pengurus dan anggota saat ini.



Bab 15

MASA DEPAN PROFESI GURU DAN ORGANISASI 5.0

Bab terakhir ini mengajak pembaca melangkah keluar dari ruang kritik dan refleksi menuju horizon masa depan profesi guru. Setelah seluruh pembahasan sebelumnya menelusuri hakikat profesi, dinamika organisasi, distorsi praktik, krisis makna, hingga tanggung jawab moral publik, kini perhatian diarahkan pada pertanyaan mendasar: ke mana profesi guru akan bergerak, dan peran apa yang akan dimainkan organisasi profesi dalam membentuk masa depan bangsa. Bab ini tidak dimaksudkan sebagai ramalan, melainkan sebagai proyeksi etis dan rasional tentang arah yang mungkin dan seharusnya ditempuh.

Indonesia menuju tahun 2045 bukan hanya menghadapi tantangan demografis dan teknologi, tetapi juga tantangan kemanusiaan. Transformasi digital, kecerdasan buatan, dan perubahan pola kerja global akan mengubah wajah pendidikan secara mendasar. Namun di balik perubahan tersebut, kebutuhan akan guru sebagai pembimbing manusia tidak akan hilang. Justru semakin kompleks dunia, semakin besar kebutuhan akan

figur pendidik yang mampu menjaga keseimbangan antara pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, masa depan profesi guru tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada logika pasar atau teknologi, melainkan harus dibangun melalui kesadaran peradaban.

Organisasi profesi guru dalam konteks ini dituntut untuk bertransformasi menjadi organisasi 5.0—organisasi yang berpusat pada manusia, berbasis ilmu, terbuka terhadap data, adaptif terhadap perubahan, serta berakar kuat pada nilai moral. Organisasi masa depan bukan lagi sekadar struktur administratif, melainkan ekosistem pengetahuan dan etika yang mendukung pertumbuhan profesional guru sepanjang hayat. Perubahan ini menuntut pergeseran paradigma dari pengelolaan anggota menuju pengembangan manusia profesional.

Bab ini juga menempatkan masa depan profesi guru dalam masyarakat terbuka. Masyarakat masa depan ditandai oleh transparansi, partisipasi, dan keterhubungan global. Dalam ruang seperti ini, profesi guru tidak bisa bersikap tertutup atau eksklusif. Kepercayaan publik akan dibangun melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kontribusi nyata terhadap kepentingan sosial. Organisasi profesi harus mampu berdialog dengan publik tanpa kehilangan otonomi profesionalnya.

Tantangan global pendidikan akan semakin kompleks, mulai dari ketimpangan akses, disrupsi teknologi, hingga krisis nilai. Dalam menghadapi tantangan ini, kekuatan utama profesi guru tidak terletak pada jumlah atau struktur, melainkan pada intelektualitas kolektif—kemampuan berpikir bersama, belajar bersama, dan mengambil keputusan berbasis pengetahuan. Organisasi profesi masa depan harus menjadi ruang bertemunya refleksi ilmiah dan praktik profesional.

Regenerasi kepemimpinan menjadi isu krusial dalam keberlanjutan profesi. Masa depan tidak dapat dibangun tanpa menyiapkan pemimpin-pemimpin profesi yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki keberanian moral. Bab ini akan menguraikan bagaimana regenerasi bukan sekadar pergantian posisi, tetapi proses pewarisan nilai dan visi peradaban.



Epilog

Organisasi Profesi Guru sebagai Nurani Kolektif Bangsa

Pada akhirnya, setiap bangsa tidak hanya ditopang oleh kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau stabilitas politik, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi namun menentukan: nurani kolektifnya. Nurani inilah yang membedakan bangsa yang sekadar bertahan dari bangsa yang beradab. Dalam perjalanan panjang pemikiran buku ini, organisasi profesi guru tidak lagi dipahami sekadar sebagai institusi administratif, melainkan sebagai salah satu ruang tempat nurani kolektif bangsa dapat hidup, diuji, dan diwariskan. Ketika profesi guru kehilangan kesadaran moralnya, pendidikan berubah menjadi mesin. Namun ketika nurani dijaga, pendidikan tetap menjadi jalan pemanusiaan manusia.

Nurani kolektif tidak pernah lahir dari satu individu, satu jabatan, atau satu periode kepemimpinan. Ia tumbuh dari kesadaran bersama yang dibangun perlahan melalui nilai, keteladanan, dan keberanian moral yang konsisten. Organisasi profesi guru memiliki potensi historis untuk menjadi wadah kesadaran tersebut karena guru bekerja langsung pada jantung masa depan bangsa: generasi muda. Setiap kebijakan pendidikan, setiap sikap organisasi, dan bahkan setiap keheningan institusional, secara langsung memengaruhi arah nurani publik.

Bangsa yang besar selalu memiliki institusi yang berani menjaga nilai ketika arus zaman berubah. Dalam sejarah, tidak semua institusi mampu menjalankan peran ini. Banyak yang larut dalam kekuasaan, terjebak dalam kenyamanan struktural, atau melemah karena kompromi nilai. Oleh sebab itu, gagasan organisasi profesi guru sebagai nurani kolektif bukanlah pujian, melainkan tanggung jawab berat. Ia menuntut keberanian untuk tetap manusiawi ketika sistem menjadi kaku, dan tetap jernih ketika ruang publik menjadi bising.

Organisasi profesi guru sebagai nurani kolektif bangsa berarti bahwa profesi ini tidak hanya mengurus kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjaga arah moral pendidikan nasional. Ia menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan sekadar alat pembangunan ekonomi, melainkan fondasi pembentukan manusia yang utuh. Dalam dunia yang semakin pragmatis, suara moral semacam ini sering dianggap tidak praktis. Namun justru karena itulah ia menjadi penting.

Nurani kolektif bekerja bukan melalui teriakan, tetapi melalui konsistensi. Ia tidak selalu hadir dalam momen besar, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil berulang kali. Ketika organisasi memilih keadilan dibanding kenyamanan, transparansi dibanding kepentingan, dan kebenaran dibanding keamanan, di situlah nurani sedang bekerja. Pilihan-pilihan kecil inilah yang pada akhirnya membentuk watak institusional.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, organisasi profesi guru memikul tanggung jawab sejarah yang panjang. Ia hidup di tengah perubahan zaman, pergantian kebijakan, dan dinamika sosial yang tidak selalu ramah terhadap nilai pendidikan. Dalam situasi seperti ini, organisasi tidak cukup hanya adaptif. Ia harus reflektif. Ia harus mampu bertanya bukan hanya “apa yang boleh dilakukan”, tetapi “apa yang seharusnya dilakukan”.

Menjadi nurani kolektif bangsa bukan berarti menempatkan diri di atas institusi lain. Justru sebaliknya, ia menuntut kerendahan hati yang mendalam. Nurani tidak memerintah, tidak menguasai, dan tidak memaksakan.

Ia mengingatkan. Ia menegur dengan lembut namun tegas. Ia hadir untuk menjaga batas ketika kekuasaan lupa pada kemanusiaan.

Guru, sebagai individu, sering kali bekerja dalam kesunyian. Banyak dari jerih payah mereka tidak tercatat dalam dokumen negara. Namun organisasi profesi guru memiliki kesempatan untuk mengangkat kesunyian itu menjadi kesadaran kolektif. Dengan demikian, pengalaman guru tidak menguap sebagai cerita personal, tetapi menjadi pengetahuan moral bangsa.

Nurani kolektif juga berarti keberanian menghadapi kenyataan pahit. Organisasi profesi guru harus mampu mengakui kelemahan, membaca distorsi, dan merefleksikan kegagalan tanpa rasa takut. Pengakuan jujur terhadap masalah bukanlah tanda kelemahan, melainkan fondasi perbaikan yang bermartabat. Bangsa tidak tumbuh dari ilusi, tetapi dari kejujuran.

Dalam masyarakat demokratis, nurani kolektif menjadi penyangga ketika hukum belum sempurna dan kebijakan belum adil. Ia tidak menggantikan sistem, tetapi mengingatkan arah. Organisasi profesi guru, jika matang secara moral, mampu memainkan peran ini tanpa jatuh pada konflik destruktif. Ia berdiri di antara keberanian dan kebijaksanaan.

Generasi mendatang akan menilai profesi guru bukan dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari nilai apa yang diwariskan. Mereka akan membaca sejarah bukan dari arsip, tetapi dari dampak pendidikan yang mereka rasakan. Dalam pengertian inilah, organisasi profesi guru sedang menulis sejarah jangka panjang bangsa—bukan dengan tinta, tetapi dengan sikap.

Nurani kolektif tidak pernah selesai dibangun. Ia harus terus dirawat, diuji, dan diperbarui. Setiap generasi guru memiliki tanggung jawab untuk tidak memutus mata rantai nilai yang telah dijaga sebelumnya. Ketika generasi hari ini lalai, generasi berikutnya menanggung akibatnya.

Buku ini tidak menawarkan kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak pernah menjadi ciri peradaban. Yang ditawarkan adalah kesadaran. Kesadaran bahwa organisasi profesi guru dapat memilih menjadi sekadar

struktur, atau melangkah lebih jauh menjadi institusi moral publik. Pilihan ini tidak mudah, tetapi bermakna.

Jika organisasi profesi guru mampu menjaga nurani kolektif bangsa, maka pendidikan akan tetap memiliki arah meskipun zaman berubah. Ketika teknologi berkembang cepat, nilai tetap menjadi jangkar. Ketika dunia menjadi riuh, guru tetap menjadi suara akal sehat. Di sinilah kemuliaan profesi menemukan tempatnya.

Epilog ini ditutup dengan satu keyakinan sederhana: bangsa yang menjaga nuraninya tidak akan kehilangan masa depan. Selama guru berpihak pada kemanusiaan, dan organisasi profesinya menjaga nilai secara kolektif, pendidikan Indonesia akan tetap memiliki harapan. Tidak selalu terang, tidak selalu mudah, tetapi tetap bermakna. Dan di sanalah, secara sunyi namun pasti, peradaban terus dilanjutkan.



Executive Summary

Buku ini disusun sebagai refleksi kritis sekaligus tawaran konseptual terhadap posisi dan peran organisasi profesi guru dalam konteks pendidikan Indonesia kontemporer. Di tengah tuntutan transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045, organisasi profesi guru memegang peran strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan secara konseptual, struktural, maupun moral. Realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas organisasi profesi sebagaimana dirumuskan dalam teori dan regulasi, dengan praktik kelembagaan yang berlangsung di lapangan.

Secara konseptual, organisasi profesi guru seharusnya berfungsi sebagai institusi penguatan profesionalisme, pengembangan keilmuan, penjaga etika profesi, serta representasi suara guru dalam ruang publik dan kebijakan. Namun dalam praktik, banyak organisasi profesi mengalami distorsi fungsi, pergeseran orientasi, serta reduksi makna profesionalisme menjadi formalitas administratif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada melemahnya organisasi, tetapi juga berkontribusi terhadap krisis profesionalisme guru dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa persoalan organisasi profesi guru tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis semata. Dibutuhkan pembacaan filosofis, teoretis, historis, empiris, serta etis untuk

memahami akar masalah secara utuh. Oleh karena itu, pembahasan diawali dengan penegasan hakikat profesi guru sebagai pekerjaan intelektual, moral, dan peradaban. Guru tidak diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai subjek profesional yang memikul tanggung jawab sosial jangka panjang.

Melalui analisis filosofis, buku ini menegaskan bahwa profesi guru memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang tidak dapat direduksi menjadi kerja administratif. Organisasi profesi, sebagai representasi kolektif guru, seharusnya berdiri di atas nilai, keilmuan, dan tanggung jawab publik. Namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika relasi antara organisasi profesi dan negara, perubahan kebijakan pendidikan, serta tekanan politik dan birokrasi telah membentuk orientasi organisasi secara tidak selalu sehat.

Analisis historis dalam buku ini memperlihatkan bahwa organisasi profesi guru di Indonesia mengalami berbagai fase: perjuangan, institusionalisasi, kooptasi, liberalisasi, hingga fragmentasi pascareformasi. Setiap fase meninggalkan jejak struktural dan budaya yang memengaruhi praktik organisasi hari ini. Pemahaman historis ini penting agar transformasi tidak dilakukan secara ahistoris dan reaktif.

Buku ini kemudian memotret kondisi kekinian organisasi profesi guru melalui analisis struktur, mekanisme keanggotaan, kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, pola komunikasi, hubungan dengan pemerintah, serta persepsi anggota. Hasil pembacaan menunjukkan adanya kecenderungan dominasi formalitas, lemahnya partisipasi substantif, minimnya transparansi, serta jarak emosional antara organisasi dan guru akar rumput.

Dari kondisi tersebut, buku ini mengidentifikasi berbagai bentuk distorsi praktik organisasi, antara lain: distorsi tujuan, distorsi fungsi profesional, distorsi advokasi, distorsi kaderisasi, distorsi partisipasi, distorsi transparansi keuangan, hingga distorsi nilai dan etika. Distorsi-distorsi ini berkontribusi langsung terhadap krisis profesionalisme guru, kelelahan moral, dan melemahnya legitimasi publik organisasi profesi.

Merespons kondisi tersebut, buku ini mengajukan kerangka konseptual **Organisasi Profesi Guru 5.0** sebagai paradigma baru. Paradigma ini dibangun atas prinsip human-centered organization, berbasis keilmuan, pelayanan, data, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Organisasi profesi tidak lagi dipahami sebagai struktur kekuasaan, melainkan sebagai ekosistem hidup yang mendukung pertumbuhan profesional guru secara berkelanjutan.

Dalam paradigma 5.0, tata kelola organisasi dirumuskan melalui konsep **good professional governance**, yang berbeda dari tata kelola korporasi maupun birokrasi negara. Penekanan diberikan pada kepemimpinan etis, sistem check and balance, pengambilan keputusan terbuka, audit kinerja dan audit moral, serta pengawasan partisipatif. Organisasi profesi diposisikan sebagai institusi publik yang bertanggung jawab kepada anggotanya sekaligus kepada masyarakat.

Buku ini juga menempatkan keterbukaan publik dan akuntabilitas sosial sebagai prasyarat utama kepercayaan. Dalam masyarakat terbuka, organisasi profesi tidak dapat bekerja secara tertutup. Transparansi program, anggaran, pelaporan kinerja, serta dialog publik menjadi bagian integral dari profesionalisme modern.

Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa organisasi profesi guru memiliki peran sebagai **institusi moral publik**. Dalam konteks krisis nilai, polarisasi sosial, dan kebisingan ruang publik, organisasi profesi guru dipanggil untuk menjadi penjaga nilai, suara akal sehat, dan nurani kolektif bangsa. Peran ini tidak bersifat politis, tetapi etis dan peradaban.

Sebagai arah ke depan, buku ini menyusun **roadmap nasional organisasi profesi guru hingga 2045**, yang mencakup tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan indikator keberhasilan yang terukur. Roadmap ini menempatkan guru sebagai aktor utama pembangunan manusia, bukan sekadar objek kebijakan.

Bab akhir buku menegaskan bahwa masa depan profesi guru ditentukan oleh kemampuan membangun intelektualitas kolektif, menjadikan organisasi sebagai pusat pengetahuan, menyiapkan regenerasi

kepemimpinan berbasis nilai, serta menjaga keberlanjutan organisasi lintas zaman. Harapan bagi guru Indonesia dirumuskan secara rasional—bukan utopis—berlandaskan integritas, kepercayaan publik, dan kesetiaan pada nilai kemanusiaan.

Secara keseluruhan, buku ini menawarkan tiga kontribusi utama:

1. **Kontribusi teoretis**, melalui sintesis filsafat profesi, teori organisasi, dan etika publik dalam konteks organisasi guru.
2. **Kontribusi praktis**, melalui peta distorsi dan model transformasi organisasi profesi guru.
3. **Kontribusi kebijakan**, melalui roadmap nasional dan kerangka organisasi profesi guru 5.0 menuju Indonesia Emas 2045.

Buku ini ditujukan sebagai rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, pimpinan organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Lebih dari itu, buku ini merupakan ajakan reflektif agar profesi guru kembali ditempatkan sebagai fondasi peradaban bangsa—bukan sekadar instrumen pembangunan, tetapi penjaga nilai kemanusiaan Indonesia.



Glosarium

Akuntabilitas Publik

Kewajiban organisasi profesi untuk mempertanggungjawabkan keputusan, program, dan penggunaan sumber daya kepada anggota dan masyarakat.

Advokasi Profesi

Upaya sistematis membela kepentingan, martabat, dan hak profesional guru melalui mekanisme etis dan konstitusional.

Aksiologi Profesi

Kajian tentang nilai, tujuan, dan makna moral yang melandasi profesi guru.

Audit Kinerja

Proses penilaian objektif terhadap efektivitas program dan dampak organisasi profesi.

Audit Moral

Evaluasi kesesuaian praktik organisasi dengan nilai, etika, dan mandat profesi.

Budaya Organisasi

Pola nilai, kebiasaan, dan sikap kolektif yang hidup dalam organisasi profesi.

Demokrasi Profesi

Sistem pengelolaan organisasi yang menjamin partisipasi setara anggota.

Disrupsi Pendidikan

Perubahan cepat akibat teknologi, sosial, dan globalisasi yang memengaruhi profesi guru.

Distorsi Fungsi

Penyimpangan peran organisasi dari mandat profesional aslinya.

Distorsi Nilai

Pergeseran nilai profesi menuju kepentingan pragmatis atau simbolik.

Etika Profesi

Prinsip moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab guru.

Etika Publik

Nilai moral yang mengikat institusi yang berperan dalam ruang publik.

Evaluasi Berkelanjutan

Penilaian organisasi yang dilakukan secara periodik dan reflektif.

Good Professional Governance

Tata kelola organisasi profesi berbasis nilai, transparansi, dan partisipasi.

Human-Centered Organization

Organisasi yang menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan alat.

Independensi Profesi

Kebebasan organisasi profesi dari tekanan politik dan kekuasaan eksternal.

Institusi Moral Publik

Organisasi yang berfungsi menjaga nilai dan nurani masyarakat.

Intelektualitas Kolektif

Kemampuan berpikir bersama berbasis ilmu dan refleksi profesi.

Keanggotaan Bermakna

Keikutsertaan aktif anggota dalam kehidupan organisasi.

Keadilan Profesional

Perlakuan setara terhadap guru tanpa diskriminasi struktural.

Kelembagaan Profesi

Struktur dan sistem formal yang menopang keberlangsungan profesi.

Kepemimpinan Etis

Kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab moral.

Keterbukaan Publik

Kesediaan organisasi membuka informasi secara jujur dan proporsional.

Kepercayaan Publik

Keyakinan masyarakat terhadap integritas organisasi profesi.

Konsolidasi Organisasi

Penguatan internal untuk membangun arah dan solidaritas bersama.

Kooptasi Struktural

Pengaruh kekuasaan eksternal yang membatasi independensi organisasi.

Legitimasi Moral

Pengakuan publik atas keabsahan etis organisasi.

Legitimasi Sosial

Dukungan masyarakat terhadap peran organisasi profesi.

Manajemen Perubahan

Strategi mengelola transformasi organisasi secara sistematis.

Martabat Profesi

Nilai kehormatan dan harga diri profesi guru.

Moral Kolektif

Kesadaran nilai bersama yang hidup dalam komunitas profesi.

Nurani Kolektif Bangsa

Kesadaran moral bersama yang menjaga arah peradaban.

Otonomi Profesional

Kewenangan guru dalam menjalankan praktik keilmuannya.

Partisipasi Anggota

Keterlibatan aktif guru dalam pengambilan keputusan organisasi.

Pelayanan Profesi

Fungsi organisasi dalam melayani kebutuhan profesional anggota.

Pelaporan Kinerja

Penyampaian hasil kerja organisasi secara transparan.

Pemimpin Nilai

Pemimpin yang menjaga arah moral organisasi.

Pengawasan Partisipatif

Sistem kontrol berbasis keterlibatan anggota.

Penguatan Kapasitas

Upaya meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota.

Peradaban Pendidikan

Proses pembentukan manusia melalui nilai dan ilmu.

Profesionalisme Guru

Komitmen etis, intelektual, dan sosial dalam menjalankan profesi.

Profesionalisme Administratif

Profesionalisme yang direduksi pada kepatuhan dokumen.

Profesi Moral

Profesi yang bertumpu pada tanggung jawab nilai.

Profesi Publik

Profesi yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

Reformasi Organisasi

Pembaruan struktur dan budaya organisasi.

Regenerasi Kepemimpinan

Proses menyiapkan pemimpin profesi masa depan.

Representasi Guru

Perwujudan suara dan kepentingan guru dalam kebijakan.

Resistensi Perubahan

Penolakan terhadap transformasi organisasi.

Roadmap Profesi

Peta arah pengembangan jangka panjang profesi guru.

Ruang Publik Pendidikan

Arena dialog antara profesi, negara, dan masyarakat.

Solidaritas Profesi

Ikatan kebersamaan antar guru.

Society 5.0

Konsep masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia.

Struktur Organisasi

Susunan formal peran dan kewenangan.

Subjek Profesional

Guru sebagai aktor sadar, bukan objek kebijakan.

Sustainabilitas Organisasi

Kemampuan organisasi bertahan lintas zaman.

Tanggung Jawab Sosial

Kewajiban profesi terhadap masyarakat.

Tata Kelola Profesi

Sistem pengelolaan organisasi profesi.

Teknokratisasi Pendidikan

Dominasi pendekatan teknis dalam pendidikan.

Transparansi Anggaran

Keterbukaan penggunaan dana organisasi.

Transformasi Profesi

Perubahan mendasar dalam cara profesi dijalankan.

Trust Building

Proses membangun kepercayaan internal dan publik.

Values-Based Organization

Organisasi yang digerakkan oleh nilai.

Warisan Etis

Nilai yang ditinggalkan bagi generasi mendatang.

Wibawa Profesi

Penghormatan sosial terhadap profesi guru.

Ekosistem Profesi

Jaringan aktor yang menopang profesi guru.

Etos Profesi

Sikap kerja bermoral dan berdedikasi.

Keadilan Sosial Pendidikan

Pemerataan mutu dan akses pendidikan.

Kebijakan Pendidikan

Keputusan publik yang mengatur sistem pendidikan.

Kebijaksanaan Profesional

Kemampuan mengambil keputusan bermakna.

Kepemimpinan Kolektif

Kepemimpinan berbasis musyawarah.

Keterwakilan Substantif

Representasi yang benar-benar menyuarakan anggota.

Knowledge Hub

Pusat pengembangan dan distribusi pengetahuan profesi.

Kualitas Pembelajaran

Mutu proses pendidikan di kelas.

Legitimasi Institusional

Pengakuan terhadap keberadaan organisasi.

Makna Profesi

Tujuan eksistensial pekerjaan guru.

Manusia Seutuhnya

Orientasi pendidikan pada kemanusiaan.

Modal Sosial

Kepercayaan dan jejaring sosial.

Organisasi Adaptif

Organisasi yang responsif terhadap perubahan.

Organisasi Kolaboratif

Organisasi berbasis kerja sama lintas pihak.

Organisasi Transparan

Organisasi terbuka terhadap publik.

Otoritas Keilmuan

Kewenangan yang lahir dari kompetensi ilmiah.

Partisipasi Demokratis

Keterlibatan anggota secara setara.

Pelayanan Berbasis Nilai

Pelayanan yang berlandaskan etika.

Pendidikan Berkelanjutan

Proses belajar sepanjang hayat.

Pemaknaan Profesi

Proses refleksi terhadap peran guru.

Pengambilan Keputusan Terbuka

Keputusan yang dapat diawasi anggota.

Penguatan Legitimasi

Upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Profesionalisme Substantif

Profesionalisme berbasis kualitas nyata.

Rasionalitas Kebijakan

Kebijakan berbasis data dan nalar.

Refleksi Institusional

Kemampuan organisasi menilai diri.

Relasi Negara–Profesi

Hubungan antara pemerintah dan organisasi guru.

Representasi Moral

Perwakilan nilai dalam ruang publik.

Responsivitas Organisasi

Kepekaan terhadap kebutuhan anggota.

Ruang Deliberatif

Forum dialog dan musyawarah.

Standar Etik

Pedoman moral profesi.

Struktur Pelayanan

Struktur yang mendukung anggota.

Sumber Daya Moral

Nilai dan integritas institusi.

Tanggung Jawab Peradaban

Peran pendidikan dalam membentuk masa depan.

Transparansi Informasi

Keterbukaan data organisasi.

Transformasi Kelembagaan

Perubahan sistemik organisasi.

Visi Peradaban

Pandangan jangka panjang pendidikan bangsa.

Voice of Teachers

Suara kolektif guru.

Voluntary Participation

Partisipasi berbasis kesadaran.

Whistleblowing Etis

Pelaporan penyimpangan secara bermoral.

Akuntabilitas Sosial

Pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kepemimpinan Transformasional Etis

Kepemimpinan perubahan berbasis nilai.

Keberanian Moral

Keteguhan menyuarakan kebenaran.

Keteladanan Institusional

Contoh nyata dari organisasi.

Konsistensi Nilai

Kesetiaan pada prinsip.

Kualitas Tata Kelola

Mutu pengelolaan organisasi.

Learning Organization

Organisasi yang terus belajar.

Makna Kolektif

Pemahaman bersama profesi.

Otonomi Institusional

Kemandirian organisasi.

Pendidikan sebagai Urusan Publik

Pendidikan milik seluruh masyarakat.

Profesional Trust

Kepercayaan berbasis kompetensi.

Refleksi Moral

Evaluasi etis tindakan organisasi.

Regulasi Internal

Aturan organisasi.

Stabilitas Organisasi

Ketahanan sistem organisasi.

Transformasi Nilai

Perubahan orientasi moral.

Warisan Intelektual Profesi

Pengetahuan dan nilai yang diwariskan lintas generasi.



Daftar Pustaka

1. **Filsafat, Profesi, Etika, dan Moral Publik**
2. Abbott, A. (1988). *The system of professions*. University of Chicago Press.
3. Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
4. Banks, S. (2018). *Ethics and values in social work* (5th ed.). Palgrave.
5. Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
6. Beck, U. (1992). *Risk society*. Sage.
7. Bernstein, B. (2000). *Pedagogy, symbolic control and identity*. Rowman & Littlefield.
8. Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement*. Routledge.
9. Biesta, G. (2015). *The beautiful risk of education*. Routledge.
10. Brint, S. (1994). *In an age of experts*. Princeton University Press.
11. Carr, D. (2003). *Making sense of education*. Routledge.
12. Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
13. Durkheim, E. (1956). *Education and sociology*. Free Press.
14. Etzioni, A. (1996). *The new golden rule*. Basic Books.
15. Freidson, E. (2001). *Professionalism: The third logic*. University of Chicago Press.
16. Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change*. Teachers College Press.

17. Fullan, M. (2014). *The principal*. Jossey-Bass.
18. Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity*. Stanford University Press.
19. Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
20. Hargreaves, A. (2000). *Four ages of professionalism*. Teachers College Press.
21. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital*. Teachers College Press.

Organisasi, Kelembagaan, Governance

22. March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions*. Free Press.
23. Mintzberg, H. (1983). *Structure in fives*. Prentice Hall.
24. North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
25. Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science*. Edward Elgar.
26. Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations*. Sage.
27. Selznick, P. (1957). *Leadership in administration*. Harper & Row.
28. Senge, P. (2006). *The fifth discipline*. Doubleday.
29. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
30. Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
31. Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.

Profesionalisme Guru dan Organisasi Profesi

32. Day, C. (2004). *A passion for teaching*. Routledge.
33. Darling-Hammond, L. (2006). *Powerful teacher education*. Jossey-Bass.
34. Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered educators*. Wiley.
35. Evans, L. (2011). The meaning of professional development. *Educational Review*, 63(1), 29–45.

36. Flores, M. A. (2014). Teacher professionalism. *European Journal of Teacher Education*, 37(4), 432–445.
37. Hoyle, E. (1980). Professionalization and deprofessionalization. *British Journal of Educational Studies*, 28(1), 42–55.
38. Ingersoll, R. (2003). *Who controls teachers' work?* Harvard University Press.
39. Ingersoll, R., & Collins, G. (2018). The status of teaching. *Educational Policy*, 32(2), 201–225.
40. Sachs, J. (2016). Teacher professionalism. *Educational Researcher*, 45(7), 413–425.
41. Whitty, G. (2008). Changing modes of teacher professionalism. *Educational Review*, 60(2), 159–173.

Demokrasi, Partisipasi, dan Ruang Publik

42. Barber, B. (2003). *Strong democracy*. University of California Press.
43. Cohen, J. (1989). Deliberation and democratic legitimacy. *The Good Polity*, 17–34.
44. Dryzek, J. (2000). *Deliberative democracy and beyond*. Oxford University Press.
45. Fung, A. (2006). Varieties of participation. *Public Administration Review*, 66, 66–75.
46. Gutmann, A. (1987). *Democratic education*. Princeton University Press.
47. Held, D. (2006). *Models of democracy*. Stanford University Press.
48. Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. Verso.
49. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
50. Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.
51. Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere. *Social Text*, 25/26, 56–80.



Biografi Penulis

Dr. Andi Hermawan, SE.Ak, S.Si, M.Pd.



Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 April 1977. Beliau adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan tanggung jawab. Sejak kecil, dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan matematika.

Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang, yang diselesaikannya pada tahun 1995. Minat yang kuat dalam bidang ekonomi dan akuntansi membawanya untuk melanjutkan studi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang, dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (**S.E., Ak.**) pada tahun 1999. Pada tahun 2014, ia berhasil menyelesaikan Program Sarjana Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Timbul Nusantara – IBK Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Sains (**S.Si.**).

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mengantarkannya untuk mengambil jalur kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Ia

menyelesaikan Program Magister Administrasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2019 dan meraih gelar Magister Pendidikan (**M.Pd**). Konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas akademik dan profesional dibuktikan dengan pencapaian tertinggi berupa gelar Doktor (**Dr.**) dalam bidang Manajemen Pendidikan dari institusi yang sama pada tahun 2022.

Dalam karier profesional telah mengabdikan sebagai Guru pada SMK PGRI 2 Cibinong, Kabupaten Bogor sejak tahun 1999 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Selain itu juga aktif di dunia akademik sebagai Dosen NIDK pada Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, almamater berbagi pengalaman dan keilmuan kepada para mahasiswa pascasarjana.

Dalam kehidupan pribadi, menikah dengan **Amalia Feryanti Salasa** dan dikaruniai seorang putri yang bernama **Azizah Luckyana Mawadda**. Keluarga kecil ini menjadi sumber inspirasi dan dukungan utama dalam perjalanan hidup dan kariernya. Selain aktif mengajar, juga dikenal sebagai penulis buku, peneliti, dan pembicara dalam berbagai forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Fokus keilmuannya meliputi manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, pendidikan vokasi, dan literasi digital guru. Publikasinya telah banyak tersebar di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus), dengan lebih dari 1.346 sitasi Google Scholar dan h-index 18 per 14 September 2025.

Komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Indonesia, terutama dalam memperkuat mutu SMK dan mendorong kepemimpinan digital di sekolah, menjadi semangat utama dalam perjalanan akademik dan pengabdianya hingga kini.



Organisasi Profesi Guru

5.0

Kritik Konseptual, Distorsi Praktik,
Rekonstruksi Rasional,
Menuju Profesionalisme dan
Keterbukaan Publik

Profesi guru menempati posisi strategis dalam bangunan peradaban modern. Di tangan guru, nilai, pengetahuan, dan arah masa depan generasi bangsa dibentuk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi profesi guru tidak dapat dipahami semata sebagai wadah administratif, melainkan sebagai institusi yang memikul tanggungjawab moral, intelektual, dan sosial yang luas.

Secara konseptual, organisasi profesi hadir untuk menjaga standar keilmuan, melindungi martabat profesi, serta memastikan bahwa praktik profesional berjalan sesuai dengan nilai etik dan kepentingan publik. Dalam kerangka tersebut, organisasi profesi guru seharusnya menjadi ruang kolektif bagi pengembangan intelektualitas, refleksi etik, dan penguatan posisi guru sebagai aktor utama pendidikan.

Namun, dinamika pendidikan kontemporer menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas tersebut dengan realitas yang berlangsung. Perubahan kebijakan yang cepat, kompleksitas birokrasi pendidikan, serta tuntutan administratif yang terus meningkat telah menggeser makna profesionalisme guru dari substansi ke prosedur. Dalam situasi ini, organisasi profesi sering kali terjebak pada fungsi representatif yang bersifat simbolik, sementara fungsi keilmuan dan etik justru melemah.



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
● www.insightpustaka.com
● 0851-5086-7290

Pendidikan

+17

ISBN 978-634-7569-47-9



9 786347 569479